



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that **Turnitin** received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Turnitin Student  
Assignment title: Assignment 2  
Submission title: BAB I PENDAHULUAN.docx  
File name: BAB\_I\_PENDAHULUA2.docx  
File size: 115.46K  
Page count: 30  
Word count: 5,932  
Character count: 40,060  
Submission date: 24-Mar-2024 01:27AM (UTC+0000)  
Submission ID: 227692457

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik selama ini menjadi bagian penting di mana negara diwakili pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam pelayanan publik akan mendorong tingginya dukungan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Pelayanan publik merupakan tempat di mana berbagai aspek pemerintahan yang bersih dan *good governance* dapat diartikulasikan secara mudah. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik" [1].

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab mengumpulkan, melaporkan, menyimpan, memelihara, memberikan, menyampaikan, dan memberikan administrasi data informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan lembaga legislatif di sekitarnya. terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan otoritas pemerintah lingkungan, dokumentasi utama/pembantu (PPID). Kemudian, yang dimaksud dengan pimpinan PPID adalah otoritas yang merupakan pimpinan utama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tugas PPID sangat vital di pemerintahan karena PPID melakukan pengawasan dan pengamanan data. PPID memainkan perannya dalam melayani kebutuhan masyarakat umum, baik secara lisan, dekat dan pribadi dan lebih jauh lagi di web [2].

PPID Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan tugasnya yaitu menangani permasalahan tentang pelayanan informasi publik seperti pengajuan permohonan informasi dan keberatan informasi. Meskipun telah menangani banyak permasalahan terkait pelayanan informasi publik, PPID Provinsi Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah masalah terkait tentang pelayanan informasi publik terkhusus pada permohonan informasi dan keberatan informasi. Saat ini sistem yang sudah berjalan masih menggunakan pihak ketiga, tidak terdapat multiuser sehingga informasi publik terkait instansi harus melewati beberapa proses yang cukup panjang agar informasi publik tersebut diproses. Selain itu pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan *tracking* permohonan yang sudah dimintai. Disisi admin, admin masih kesulitan dalam merekap